



SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2021
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7/D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/A);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**dan**

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.766.852.238.118 bertambah sebesar Rp 325.009.907.085 sehingga menjadi Rp 3.091.862.145.203 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	2.609.852.238.118
b. Berkurang	Rp	<u>(12.297.413.787)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.597.554.824.331
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	2.766.852.238.118
b. Bertambah	Rp	<u>325.009.907.085</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	3.091.862.145.203
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	197.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>341.807.320.872</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	538.807.320.872
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	40.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>4.500.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	44.500.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	494.307.320.872
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	477.849.405.356
2) Berkurang	Rp	<u>(7.199.089.669)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	470.650.315.687
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	2.033.709.832.562
2) Berkurang	Rp	<u>(19.308.698.376)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.014.401.134.186
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	98.293.000.200
2) Bertambah	Rp	<u>14.210.374.258</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	112.503.374.458

**Pasal 4**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
    - 1) Semula Rp 120.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp 1.737.606.000
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 121.737.606.000
  - b. Retribusi daerah;
    - 1) Semula Rp 15.340.358.396
    - 2) Bertambah Rp 440.694.990
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 15.781.053.386
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
    - 1) Semula Rp 3.430.661.197
    - 2) Bertambah Rp 1.132.633.658
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 4.563.294.855
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
    - 1) Semula Rp 339.078.385.763
    - 2) Berkurang Rp (10.510.024.317)
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 328.568.361.446.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp1.899.179.635.929
    - 2) Berkurang Rp (46.105.274.807)
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.853.074.361.122
  - b. Transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp 134.530.196.633
    - 2) Bertambah Rp 26.796.576.431
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 161.326.773.064
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp 11.502.000.200
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah hibah setelah perubahan Rp 11.502.000.200
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp 86.791.000.000
    - 2) Bertambah Rp 14.210.374.258
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 101.001.374.258

**Pasal 5**

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - 1) Semula Rp 1.976.265.264.958
  - 2) Bertambah Rp 117.803.182.838

Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 2.094.068.447.796
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 296.411.876.148
2) Bertambah	<u>Rp 155.831.721.959</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 452.243.598.107
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 6.796.276.500
2) Bertambah	<u>Rp 27.464.528.488</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 34.260.804.988
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 487.378.820.512
2) Bertambah	<u>Rp 23.910.473.800</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 511.289.294.312

### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.109.662.975.847
2) Bertambah	<u>Rp (9.540.613)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 1.109.653.435.234
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 752.702.542.841
2) Bertambah	<u>Rp 78.092.295.301</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 830.794.838.142
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah	<u>Rp 3.500.000.000</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 3.500.000.000
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 94.670.731.270
2) Bertambah	<u>Rp 23.910.811.650</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 118.581.542.920
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 19.229.015.000
2) Bertambah	<u>Rp 12.309.616.500</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 31.538.631.500
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah;	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah	<u>Rp 45.814.400.000</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 45.814.400.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp	69.705.748.180
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>75.739.517.387</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	145.445.265.567
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
1) Semula	Rp	143.931.006.910
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>17.422.845.241</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	161.353.852.151
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp	81.856.572.058
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>14.546.147.211</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp	96.402.719.269
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1) Semula	Rp	360.549.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.262.812.120</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.623.361.120
f. Belanja modal aset lainnya;		
1) Semula	Rp	558.000.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>46.000.000</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	604.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	6.796.276.500
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>27.464.528.488</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	34.260.804.988
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	17.075.874.627
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	17.075.874.627
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	470.302.945.885
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>23.910.473.800</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	494.213.419.685

#### **Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;		
1) Semula	Rp	197.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>341.807.320.872</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	538.807.320.872
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	40.000.000.000
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.500.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	44.500.000.000

**Pasal 8**

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
    - 1) Semula Rp 177.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp 341.789.320.872
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 518.789.320.872
  - b. Penenerimaan Pinjaman Daerah
    - 1) Semula Rp 20.000.000.000
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 20.000.000.000
  - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp 0
    - 2) Bertambah Rp 18.000.000
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 18.000.000
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp 20.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp 0
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 20.000.000.000
  - b. Penyertaan modal daerah
    - 1) Semula Rp 0
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.500.000.000
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 4.500.000.000
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
    - 1) Semula Rp 20.000.000.000
    - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 20.000.000.000

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 21 September 2021  
**BUPATI JOMBANG,**

**ttd**

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 21 September 2021  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**ttd**

**AKH. JAZULI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 7/A  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 165-7/2021**

